



LAKIP 2023

**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA METRO**



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah diterangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja organisasi pemerintah selama 1 tahun. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan daerah di bidang pertanian memiliki kewajiban menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara teratur dan jelas.

Laporan Kinerja ini mempunyai dua fungsi yaitu : 1). sebagai sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 2). Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Guna memenuhi kedua fungsi tersebut, Laporan Kinerja ini berisikan informasi mengenai Perencanaan Strategik, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan analisis pencapaian kinerja, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro tahun 2021 - 2026.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang lebih terarah sebagai dasar perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Metro, Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Metro,



HERY WIRATNO, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700413 199903 1 004



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro merupakan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Metro. Pada Laporan Kinerja tahun 2023 memuat struktur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro berdasarkan PERDA Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro berdasarkan Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis. Sasaran Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran dengan 22 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023 dikategorikan cukup berhasil karena persentase pencapaian indikator kinerja sasaran rata-rata lebih dari 90 %.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sudah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menunjukkan realisasi pencapaian anggaran 20.395.445.182 (97,15 %).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023 untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak eksekutif, legislatif dan jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, serta untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Metro, Januari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Metro,



HERY WIRATNO, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700413 199903 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I. Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 24 |
| 1.3 Analisa Swot | 27 |
| 1.4 Prioritas Masalah | 29 |
| 1.5 Isu Strategis | 30 |
| BAB II Perencanaan Kinerja | 34 |
| 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 34 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama | 43 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja | 52 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 | 52 |
| 3.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023 | 52 |
| 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya | 57 |
| 3.4 Capaian Anggaran Tahun 2023 | 58 |
| 3.5 Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya | 65 |
| 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah | 76 |
| 3.7 Analisis dan Evaluasi | 78 |
| BAB IV Penutup | 89 |
| 4.1 Kesimpulan | 89 |
| 4.2 Upaya Peningkatan Kinerja | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan dan BP4K Kota Metro, yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Pengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

- f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- l. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- m. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. Perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan;
- r. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- s. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi pada sekretariat dan bidang-bidang adalah sebagai berikut:

1.1.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta perikanan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
- b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- f) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- h) Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- i) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- j) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. *Kelompok Sub-Substansi Keuangan dan Aset*

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/Daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Keuangan dan Aset;
- b) Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d) Melakukan urusan gaji pegawai;
- e) Melakukan administrasi keuangan;
- f) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k) Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;

- l) Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Keuangan dan Aset;
- n) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut

- a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.2 BIDANG KETAHANAN PANGAN

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan*

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan dan kerawanan pangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan kerawanan pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melakukan penyiapan pendampingan Dewan Ketahanan Pangan Kota Metro;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan , kerawanan pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- e) Melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f) Melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

- g) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- k) Melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- l) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; dan
- m) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kelompok Sub-Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, cadangan pangan, pasokan dan harga pangan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi, cadangan pangan, pasokan dan harga pangan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, cadangan pangan pasokan dan harga pangan;
- d) Melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e) Melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;

- g) Melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kota (Pangan Pokok dan Pangan Pokok Lokal);
- h) Melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j) Melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k) Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- l) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan, pasokan dan harga pangan; dan
- m) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. *Kelompok Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan*

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan informasi keamanan pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- d) Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- e) Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan wisata keluarga;
- f) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g) Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan dan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- i) Melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal dan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS);
- j) Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local dan mewujudkan penumbuhan kawasan wisata keluarga kebun organik;
- k) Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- l) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan
- m) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.3 BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan bimbingan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- f. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana pertanian; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Pertanian*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura

dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi pertanian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi pertanian;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d) Melakukan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
- e) Melakukan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sumber-sumber air pertanian;
- f) Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g) Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- h) Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- i) Melakukan penyediaan pupuk dan pestisida;
- j) Melakukan penyediaan alat dan mesin pertanian;
- k) Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- l) Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida alat dan mesin pertanian;
- m) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
- n) Melakukan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. *Kelompok Sub-Substansi Tanaman Pangan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perbenihan dan perlindungan, pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam hal peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d) Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya, peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- e) Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman pangan;
- f) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam terhadap tanaman pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- i) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar serta promosi produk tanaman pangan;
- j) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- k) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan tanaman pangan;

- l) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. *Kelompok Sub-Substansi Hortikultura dan Perkebunan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam hal peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan serta pemasaran hasil Hortikultura dan Perkebunan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi Hortikultura dan Perkebunan;
- d) Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya, peningkatan mutu dan produksi Hortikultura dan Perkebunan;
- e) Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan benih/bibit Hortikultura dan Perkebunan;
- f) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura dan Perkebunan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam terhadap tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
- h) Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura dan Perkebunan;
- i) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar serta promosi produk Hortikultura dan Perkebunan;

- j) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura dan Perkebunan;
- k) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Hortikultura dan Perkebunan;
- l) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.4 BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan usaha agribisnis peternakan;
- l. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Benih/Bibit dan Produksi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d) Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e) Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f) Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan (IB);
- h) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- i) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan benih/bibit dan produksi peternakan; dan
- j) Melakukan tugas lain kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pelaporan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan serta melaksanakan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- d) Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e) Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner;
- f) Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan hewan;
- g) Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h) Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan di tingkat distributor;
- i) Melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha distributor obat hewan dan penerbitan surat izin praktek dokter hewan;
- j) Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner terhadap produk hewan yang keluar/masuk wilayah;
- k) Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- l) Melakukan penyiapan bahan bimbingan penerapan dan kesejahteraan hewan;
- m) Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

- n) Melakukan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV;
- o) Menyelenggarakan bimbingan penerapan dan standard minimal RPH/RPU, Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Laboratorium Kesmavet;
- p) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan monitoring surveilans pemeriksaan bahan pangan asal hewan terhadap residu bahan kimia – antibiotic dan cemaran mikroba;
- q) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner; dan
- r) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. *Kelompok Sub-Substansi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah, dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d) Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- f) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
- g) Melakukan fasilitasi promosi produk di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- h) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;
- i) Melakukan rekapitulasi laporan perkembangan ternak bantuan pemerintah;
- j) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- k) Memberikan rekomendasi izin usaha peternakan;
- l) Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- m) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- n) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.5 BIDANG PENYULUHAN

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyusun rancangan program penyuluhan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, serta melaksanakan pembinaan informasi dan kemitraan di bidang penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan;
- f) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g) Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan;
- h) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
- i) Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. *Kelompok Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan;
- c) Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan;
- e) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluhan;
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
- g) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Ketenagaan Penyuluhan; dan
- h) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. *Kelompok Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi

di bidang metode dan informasi penyuluhan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan;
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- e) Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- f) Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;

- g) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan; dan
- h) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.6 BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang perikanan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. *Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Perikanan*

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya perikanan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya perikanan ;
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM pengolah hasil perikanan ;
- c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM perikanan non konsumsi;
- d) Memfasilitasi kemitraan usaha pengolah hasil perikanan dan perikanan non konsumsi;

- e) Melaksanakan upaya peningkatan konsumsi ikan;
- f) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
- g) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan non konsumsi;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sumber daya perikanan;
- i) Melaksanakan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan:
- j) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi keamanan pangan (food safety);
- k) Melaksanakan pembinaan obat ikan, kimia dan biologi;
- l) Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pokmaswas perikanan; dan
- m) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. *Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Budidaya Perikanan*

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan budidaya ikan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- d) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan statistik perikanan budidaya;
- e) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM pembudidaya ikan;
- f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pakan mandiri;
- g) Memfasilitasi kaji terap teknologi budidaya ikan di tingkat pembudidaya ikan;

- h) Memfasilitasi penerbitan sertifikat Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Izin Usaha Perikanan (IUP);
- i) Memfasilitasi kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dan
- j) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

C. *Kelompok Sub-Substansi Perbenihan Perikanan*

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan ikan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- c) Memfasilitasi penyediaan benih ikan untuk pembudidaya ikan;
- d) Memfasilitasi calon induk ikan yang bermutu untuk Unit Perbenihan Rakyat;
- e) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;
- f) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan statistik perbenihan;
- g) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM pembenih ikan;
- h) Memfasilitasi kemitraan usaha perbenihan ikan;
- i) Memfasilitasi kaji terap teknologi perbenihan ikan di tingkat pelaku usaha; dan
- j) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan walikota Metro Nomor 30 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

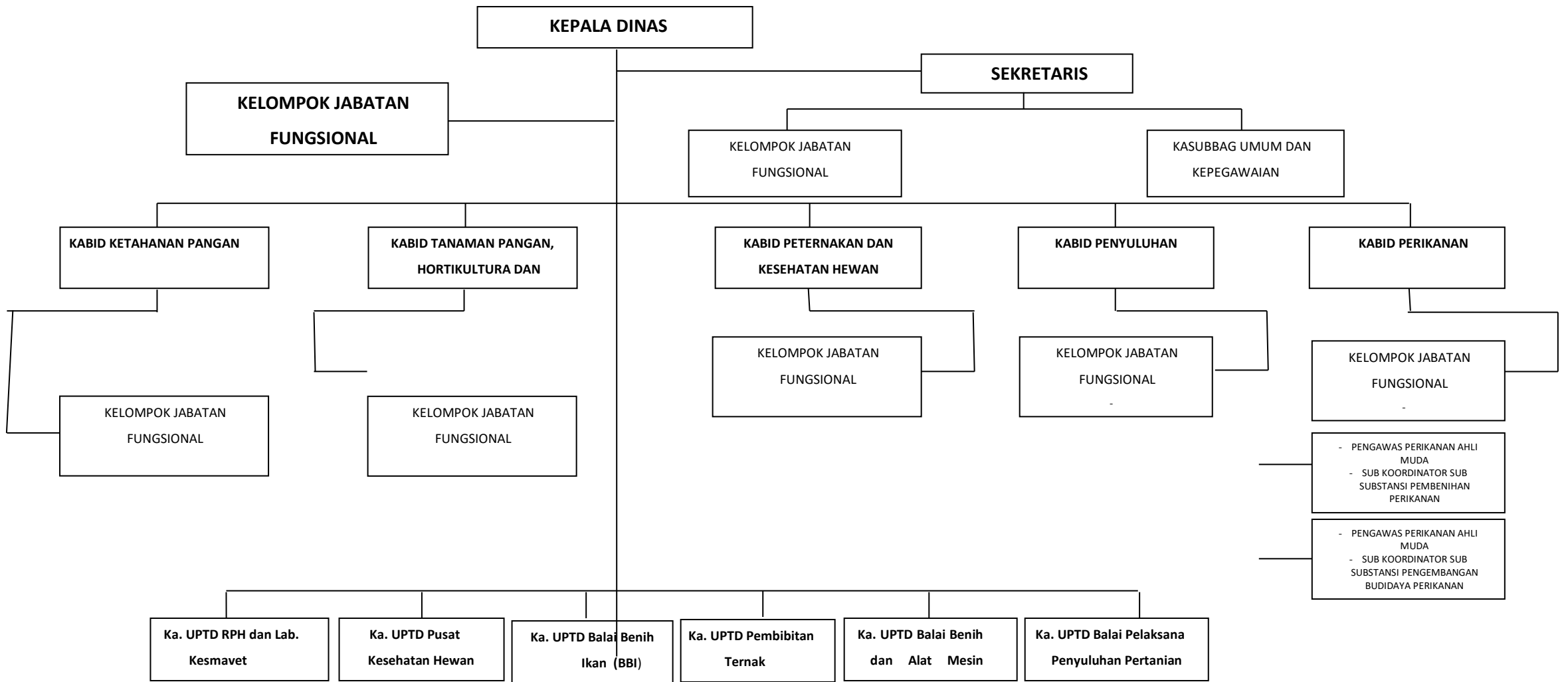
Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Ketahanan Pangan
4. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Bidang Penyuluhan
7. Bidang Perikanan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro terdiri dari :

1. UPTD Balai Budidaya Ikan
2. UPTD Rumah Potong Hewan
3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan
4. UPTD Balai Benih dan Alsintan
5. UPTD Perbibitan Ternak
6. UPTD BP3

Adapun Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.



1.3. ANALISA SWOT

Dalam menetapkan strategi digunakan Analisis SWOT. Analisis ini adalah instrument perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan faktor internal, yaitu: kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta faktor internal, yaitu: peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Dalam analisis SWOT, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam kategori faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro
- 2) Tersedianya sumberdaya (manusia dan anggaran) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
- 3) Adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai serta suasana kerja yang kondusif
- 5) Tersedianya sumberdaya pangan pertanian dan perikanan lokal Metro

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM dinas,
- 2) Penempatan SDM masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar seksi atau bidang
- 4) Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal
- 5) Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi
- 6) Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang/Kesempatan (*Opportunities*)

- 1) Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan merupakan isu strategis skala nasional maupun internasional;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan untuk penguatan ketahanan pangan seperti : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 3) Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat, aman dan berlabel halal dari masyarakat;
- 4) Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan di daerah
- 5) Tersedianya kelembagaan petani/keompok tani, Gapoktan, KTNA dan sejenis yang mampu meningkatkan dinamika usaha tani;
- 6) Adanya aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung pengembangan pertanian seperti aturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- 7) Terdapatnya event-event dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai ajang promosi produk olahan pertanian, produk olahan peternakan, dan produk olahan perikanan.

- 8) Adanya trend *Urban Farming* mendorong terlaksananya usaha pertanian, peternakan dan perikanan secara bersamaan.
- 9) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

b. Faktor Ancaman/Hambatan (Threath)

- 1) Fenomena penggunaan bahan pangan menjadi energy alternatif yang berkaitan erat dengan harga dan stok pangan tingkat regional, nasional dan internasional;
- 2) Semakin maraknya produk pertanian pangan segar dan olahan yang belum terjamin keamanannya dan belum memiliki izin edar;
- 3) Sifat komoditas pangan yang musiman yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga;
- 4) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan pemberlakuan standarisasi internasional serta adanya globalisasi teknologi informasi dan transportasi.
- 5) Belum tumbuhnya kelembagaan pangan yang dikelola secara professional.

1.4. PRIORITAS MASALAH

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam proses pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan :

a. Bidang Pangan

- 1) Rendahnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan akibat kurangnya sarana prasarana dan petugas Pengawas
- 2) Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan penghasilan petani belum optimal
- 3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).

b. Bidang Pertanian

- 1) Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian meningkat
- 2) Penurunan jumlah hewan yang dipotong di RPH disebabkan jumlah pemotongan ayam potong yang berkurang akibat dampak pandemi.
- 3) Sumber daya manusia petugas Lab di Laboratorium Kesmavet masih terbatas
- 4) Sarana prasarana RPH, laboratorium kesmavet, Perbibitan Ternak dan Puskesmas masih terbatas dalam rangka meningkatkan PAD.
- 5) Kurang berkembangnya Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang Unggul, mandiri dan mempunyai daya saing.
- 6) Kelembagaan petani belum menjadi kelembagaan ekonomi petani yang efektif dan mandiri.

c. Bidang Perikanan

- 1) Usaha perikanan darat masih pada skala usaha rumah tangga dan sulit untuk berkembang karena kurangnya sifat kompetitif masyarakat/petani perikanan
- 2) Sumberdaya manusia pembenih terampil di Balai Benih Ikan masih terbatas
- 3) Tingkat Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah dibawah target Nasional
- 4) Harga pakan ikan pabrikan yang cenderung terus meningkat menyebabkan biaya produksi ikan semakin tinggi dan harga jual yang tidak kompetitif

1.5. ISU STRATEGIS

Berakar dari permasalahan yang ada, disusunlah isu strategis pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Tahun 2023.

Isu strategis tersebut antara lain :

a. Bidang Pangan

- 1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan
- 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan Seimbang.

- 3) Pemanfaatan lahan pekarangan
- b. Bidang Pertanian
- 1) Peningkatan pertanian perkotaan
 - 2) Peningkatan sarana-prasarana dan alat mesin pertanian
 - 3) Peningkatan produktivitas ternak
 - 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian
- c. Bidang Perikanan
- 1) Peningkatan pembinaan kepada rumah tangga perikanan
 - 2) Peningkatan keamanan pangan hasil perikanan.
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan

Perencanaan strategik Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dijabarkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

A. Tujuan

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan.;
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

B. Sasaran

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan
3. Meningkatnya Produksi Perikanan
4. Meningkatnya Mutu Produk Perikanan
5. Meningkatnya Produksi Pangan Utama
6. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern

7. Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan/Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya keamanan pangan asal hewan yang ASUH
8. Meningkatnya Keterampilan Dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja masing-masing sasaran terlampir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro disusun sebagai laporan kinerja instansi daerah sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan di dalam pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada masa yang akan datang.

a) *Dasar Hukum*

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026;

b) Tujuan dan Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah :

Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah :

1. Menjadikan Perangkat Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Program Kegiatan tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Metro Tahun 2023**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TARGET |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar | 88 % |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | 1.984,30 Ton |
| 3. | Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 3 Pelaku usaha |
| 4. | Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | 30,634 Ton |
| | | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi) | 59,2 Kw/ha |
| 5. | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | 60 % |
| 6. | Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 ekor |
| | | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 50 % |
| 7. | Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | 34 % |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|----------------------------|
| 8. | Meningkatnya Revormasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Nilai Reformasi Birokrasi | 73,7 Skor |
| 9 | Terpenuhinya Dukungan Layanan Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitsrasi Perangkat | 100 % |
| 10. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama | Ketersediaan pangan utama (beras) | 21.110,55 Ton |
| 11. | Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.400 Energy 63 protein |
| 12. | Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 150 Ton |
| 13. | Meningkatnya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat | Persentase Peningkatan keamanan pangan segar | 88 % |
| 14. | Meningkatnya Produksi Perikanan Di Kota Metro | Produksi Perikanan | 1.984,3 Ton |
| 15. | Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Metro | Tingkat Konsumsi ikan | 40,05 % |
| 16. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB | 4,66 % |
| 17. | Meningkatnya Produktivitas Padi | Produktivitas bahan pangan utama (padi) | 59,2 kwintal |
| 18. | Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 ekor |
| 19. | Terpenuhinya Dukungan Pembinaan Kelompok Tani | Cakupan Pelayanan Kelompok Tani | 34 % |

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebagai berikut :

**Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TARGET |
|---|---|----------------|
| Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar | 88 % |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | 1.984,30 Ton |
| Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 3 Pelaku usaha |
| Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | 30.634 Ton |
| | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi) | 59,2 Kw/ha |
| Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | 60 % |
| Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 ekor |
| | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 50 % |
| Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | 34 % |
| Meningkatnya Reformasi Birokasi Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan Kota Metro | Nilai reformasi Birokasi | 73,7 Skor |
| Terpenuhinya Dukungan Layanan Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat | 100 % |
| Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama | Ketersediaan pangan utama (beras) | 21.110,55 Ton |
| Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.400 Energy |
| | | 63 protein |
| Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 150 Ton |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|--------------|
| Meningkatnya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat | Persentase Peningkatan keamanan pangan segar | 88 % |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Di Kota Metro | Produksi Perikanan | 1.984,3 Ton |
| Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Metro | Tingkat Konsumsi ikan | 40,05 % |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB | 4,66 % |
| Meningkatnya Produktivitas Padi | Produktivitas bahan pangan utama (padi) | 59,2 kwintal |
| Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 ekor |

Untuk mencapai target sebagaimana pada Tabel 1 dan 2 di atas, ditetapkan berbagai program yang dilaksanakan pada tahun 2023. Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam APBD Perubahan Tahun 2023 terdiri dari 11 (sebelas) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 54 (Lima puluh empat) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- a. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- a. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

VII. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik lokasi
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- c. Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman

3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan mutu Benih/Bibit Ternak, bahan pakan/pakan/tanaman Skala Kecil

4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak

IX. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.

X. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- c. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

5. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

- a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

XI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategi Operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra satuan kerja perangkat daerah. Ada 11 Indikator Kinerja Utama yang di emban oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Perikanan Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel. 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| N O | SASARAN/ ALASAN | URAIAN IKU | SATUAN | PROGRAM & KEGIATAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------|---|---|---------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan | 1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat | 100 % | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Sekretariat/Bidang/UPT yang Terlayani | Sekretariat |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | |
| | | | | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | |
| | | | | | | |
| | | | | 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | | | | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | | | | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | |
| | | | | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | |
| | | | | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | |
| | | | | | | |
| | | | | 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | - Pengadaan Mebel | | |
| | | | | | | |
| | | | | 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |
| | | | | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | | | |
| | | | | 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | |
| | | | | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |
| 2. | Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | 2. Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | 21.110,55 ton | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Produksi padi x 0,6402 + stok + Pangan masuk - Pangan Keluar | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | 3. Ketersediaan Energi Dan Protein perkapita | 2.400 Kkal/kap 63 Kkal/kap | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan - Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan | Ketersediaan perkap (gr/hr)x%BDDxkandungan energy:100 Ketersediaan perkap (gr/hr)x%BDDxkandungan protein:100 % BDD = % bagian yang dapat dimakan | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | | 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------|--|--|--|
| | | | | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | 3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target | | |
| | | | | Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi | | |
| | | | | - Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan | | |
| | | | | - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | | |
| | | 4. Peningkatan cadangan Pangan Masyarakat | 150 ton | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan di Masyarakat (Lumbung)(Ton) | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | | 1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | |
| | | | | - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar | 88 % | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Jumlah Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi ----- x 100 % Jumlah Sampel yang Diuji | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | | 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 3. Meningkatnya Produksi Pangan Utama | 6. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | 46,60 % | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kontribusi Sektor -----x 100 % Total PDRB | Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | |
| | | | | - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas Teknologi dan Spesifik lokasi | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|-----------|--|------------------------------|---|
| | | | | - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | |
| | | | | 2. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota | | |
| | | | | - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | | |
| | | | | - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | |
| | | | | - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | |
| 4. | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Yang Modern | 7. Produktivitas Bahan Pangan Utama | 59,2 kw | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Produksi (Kw) -----x 100% | Bidang Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan |
| | | | | 1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas Panen (Ha) | |
| | | | | - Pengelolaan lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian Pangan berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan pertanian pangan Berkelanjutan/LCP2B | | |
| | | | | 2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | | |
| | | | | - Pembagunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | |
| 5. | Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan/ Penyakit Hewan Menular Dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | 8. Cakupan Pelayanan Hewan | 8050 ekor | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Hewan Tervaksin dan Terobati | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | 1. Kegiatan penjaminan kesehatan hewan Penutupan dan pembkkaan daerah wabah Penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/kota | | |
| | | | | - Pengendalian dan penanggulangan Penyakit menular zoonosis | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | 2. Kegiatan pengawasan pemasukan dan | | |
| | | | | Pengeluaran hewan dan produk hewan | | |
| | | | | Daerah kabupaten kota | | |
| | | | | - Penilaian resiko penyakit hewan dan | | |
| | | | | Keamanan produk hewan | | |
| | | | | | | |
| | | | | 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa | | |
| | | | | Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner | | |
| | | | | Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik | | |
| | | | | Veteriner | | |
| | | | | | | |
| | | | | 4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan | | |
| | | | | Persyaratan Teknis Kesehatan | | |
| | | | | Masyarakat Veteriner | | |
| | | | | - Pengawasan Peredaran Hewan dan | | |
| | | | | Produk Hewan | | |
| | | | | - Pendampingan unit usaha hewan dan | | |
| | | | | produk hewan | | |
| | | | | - Pengujian laboratorium kesehatan | | |
| | | | | Masyarakat veteriner | | |
| | | | | | | |
| | | | | 5. Kegiatan penerapan dan pengawasan | | |
| | | | | Persyaratan teknis kesejahteraan hewan | | |
| | | | | - Pendampingan penerpan unit | | |
| | | | | Kesejahteraan hewan | | |
| | | | | | | |
| | | | | Program Pengendalian dan Pengembangan | | |
| | | | | Sarana Pertanian | | |
| | | | | 1. Kegiatan pengendalian dan pengawasan | | |
| | | | | Penyediaan dan peredaran benih/bibit | | |
| | | | | Ternak,dan hijauan pakan ternak | | |
| | | | | Dalam daerah kabupaten /kota | | |
| | | | | - Pengendalian penyediaan benih/bibit | | |
| | | | | Ternak dan hijauan pakan ternak | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|-------------|---|---|-------------------|
| 6. | Meningkatnya Ketrampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | 9 | Cakupan Binaan Kelompok Tani | 34 % | Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah kelompok tani, Pokdakan, Kelompok Ternak, KWT yang mendapat bantuan/binaan ----- x100% Total Kelompok Tani, Pokdakan Kelompok Ternak KWT | Bidang Penyuluhan |
| 7. | Meningkatnya Produksi Perikanan | 10 | Produksi Perikanan | 1.984,3 Ton | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan Bantuan pembiayaan, kemitraan usaha - Pemberian pendampingan, kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi Dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan 2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan prasarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan kesehatan ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (satu) | Jumlah Produksi Ikan (Ton) ----- x 100% Target Daerah (Ton) | Bid. Perikanan |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Daerah kabupaten kabupaten Kota | | |
| | | | | - Pembinaan dan pemantauan | | |
| | | | | pembudidayaan ikan di darat | | |
| | | | | - Perencanaan dan Pengembangan | | |
| | | | | Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan | | |
| | | | | Ikan di Darat | | |
| | | | | | | |
| 8. | Meningkatnya | 11 | Tingkat Konsumsi | 40,05 % | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) |
| | Mutu Produk | | Ikan | | 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran | ----- x 100% |
| | Perikanan | | | | Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan | Target Daerah (Kg) |
| | | | | | Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk | |
| | | | | | Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam | |
| | | | | | 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | - Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha | |
| | | | | | Perikanan skala mikro dan kecil dalam | |
| | | | | | 1 (satu) daerah kabupaten /kota | |
| | | | | | | |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Tingkat Pencapaian Sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana) tingkat capaian dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

| |
|--|
| $\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ |
|--|

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

| |
|--|
| $\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$ |
|--|

Sasaran dalam Renstra 2021-2026 terdapat 8 sasaran Strategis. Pada Tahun 2023 ini Pencapaian Sasaran pada sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan RKT Tahun 2023.

3.2. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja ditampilkan capaian kinerja pada PK dan RKT tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET PERUBAHAN 2023 | REALISASI PERUBAHAN 2023 | | CAPAIAN % | |
|----|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------|
| | | (OUTCOME) | | | | | |
| 1. | Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar | 88 | % | 93,7 | % | 106,48 |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | 1.984,4 | Ton | 1.907,788 | Ton | 96,14 |
| 3. | Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | Pelaku usaha | - | Pelaku usaha | 0,00 |
| 4. | Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | 30.634 | Ton | 30.846,55 | Ton | 100,69 |
| | | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi) GKP | 59,2 | Kw/ha | 58,42 | Kw/ha | 98,68 |
| 5. | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | 60 | % | 100 | % | 166,67 |
| 6. | Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 | ekor | 14.720 | Ekor | 182,86 |
| | | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 50 | % | - | % | 0,00 |
| 7. | Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | 34 | % | 43,5 | % | 127,94 |
| 8. | Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro | Nilai Reformasi Birokrasi | 73,7 | Skor | - | Skor | 0,00 |
| 9. | Terpenuhinya Dukungan Layanan Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat | 100 | % | 100 | % | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| 10. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama | Ketersediaan pangan utama (beras) | 21.110,55 | Ton | 20.799,25 | Ton | 98,53 |
| 11. | Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.400 | Energy | 2.664 | Energy | 111,00 |
| | | | 63 | protein | 82,82 | Protein | 131,46 |
| 12. | Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 150 | Ton | 175 | Ton | 116,67 |
| 13. | Meningkatnya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat | Persentase Peningkatan keamanan pangan segar | 88 | % | 93,7 | % | 106,48 |
| 14. | Meningkatnya Produksi Perikanan Di Kota Metro | Produksi Perikanan | 1.984,3 | Ton | 1.907,788 | Ton | 96,14 |
| 15. | Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Metro | Tingkat Konsumsi ikan | 40,5 | % | 37,36 | % | 92,25 |
| 16. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB | 4,66 | % | - | % | 0,00 |
| 17. | Meningkatnya Produktivitas Padi | Produktivitas bahan pangan utama (padi) | 59,2 | kwintal | 58,42 | Kwintal | 98,68 |
| 18. | Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 | ekor | 14.720 | Ekor | 182,86 |
| 19. | Terpenuhinya Dukungan Pembinaan Kelompok Tani | Cakupan Pelayanan Kelompok Tani | 34 | % | 43 | % | 126,47 |

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja ditampilkan capaian kinerja pada RKT tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Pencapaian RKT Tahun 2023

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TARGET PERUBAHAN 2023 | REALISASI PERUBAHAN 2023 | CAPAIAN % |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar | 88 % | 93,7 % | 106,48 |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | 1.984,4 Ton | 1.907,788 Ton | 96,14 |
| Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 3 Pelaku usaha | 0 Pelaku usaha | 0,00 |
| Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | 30.634 Ton | 30.846,55 Ton | 100,69 |
| | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)GKP | 59,2 Kw/ha | 58,42 Kw/ha | 98,68 |
| Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | 60 % | 100 % | 166,67 |
| Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 ekor | 14.720 Ekor | 182,86 |
| | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 50 % | 0 % | 0,00 |
| Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | 34 % | 43,5 % | 127,94 |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro | Nilai Reformasi Birokrasi | 73,7 Skor | - Skor | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------|
| Terpenuhinya Dukungan Layanan Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat | 100 % | 100 % | 100 |
| Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan pangan utama (beras) | 21.110,55 Ton | 20.799,25 Ton | 98,53 |
| | Ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.400 Energi | 2.664 Energi | 111,00 |
| Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 63 Protein | 82,82 Protein | 131,46 |
| Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 150 Ton | 175 Ton | 116,67 |
| Meningkatnya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat | Persentase Peningkatan keamanan pangan segar | 88 % | 93,7 % | 106,48 |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Di Kota Metro | Produksi Perikanan | 1.984,3 Ton | 1.907,788 Ton | 96,14 |
| Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Metro | Tingkat Konsumsi ikan | 40,5 % | 37,36 % | 92,25 |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB | 4,66 % | - % | 0,00 |
| Meningkatnya Produktivitas Padi | Produktivitas bahan pangan utama (padi) | 59,2 Kwintal | 58,42 Kwintal | 98,68 |
| Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan | Cakupan Pelayanan Hewan | 8.050 Ekor | 14.720 Ekor | 182,86 |
| Terpenuhinya Dukungan Pembinaan Kelompok Tani | Cakupan Pelayanan Kelompok Tani | 34 % | 43 % | 126,47 |

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan pada tahun 2023 dengan Tahun 2022 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | Kenaikan/ Penurunan |
|----|---|---|----------------|----------------|---------------------|
| 1. | Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar | 94 % | 93,7 % | -0,32 % |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | 1.909,10 Ton | 1.907,788 Ton | -0,07 % |
| 3. | Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 0 Pelaku usaha | 0 Pelaku usaha | 0 % |
| 4. | Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | 29.891 Ton | 30.846,55 Ton | 3,20 % |
| | | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi) | 67,81 Kw/ha | 58,42 Kw/ha | -13,85 % |
| 5. | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | 40 % | 100 % | 150,00 % |
| 6. | Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | 10.268 ekor | 14.720 ekor | 43,36 % |
| | | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 9 % | 0 % | - % |
| 7. | Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | 44 % | 43,5 % | -1,14 % |
| 8. | Meningkatnya Revormasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Metro | Nilai Reformasi Birokrasi | 75,19 Skor | - Skor | - % |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|---------------|----------|
| 9. | Terpenuhinya Dukungan Layanan Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat | 100 % | 100 % | 100 % |
| 10. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama | Ketersediaan pangan utama (beras) | 19.208,97 Ton | 20.799,25 Ton | 8,28 % |
| 11. | Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.396,78 Energy | 2.664 Energi | 11,15 % |
| | | | 77,06 protein | 82,82 protein | 7,47 % |
| 12. | Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah Cadangan pangan masyarakat | 118,5 Ton | 175 Ton | 47,68 % |
| 13. | Meningkatnya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat | Persentase Peningkatan keamanan pangan segar | 94 % | 93,7 % | -0,32 % |
| 14. | Meningkatnya Produksi Perikanan Di Kota Metro | Produksi Perikanan | 1.909,1 Ton | 1.907,788 Ton | -0,07 % |
| 15. | Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Metro | Tingkat Konsumsi ikan | 37,27 % | 37,36 % | 0,24 % |
| 16. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB | 5,24 % | - % | - % |
| 17. | Meningkatnya Produktivitas Padi | Produktivitas bahan pangan utama (padi) | 67,61 kwintal | 58,42 kwintal | -13,59 % |
| 18. | Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan | Cakupan Pelayanan Hewan | 10.268 ekor | 14.720 ekor | 43,36 % |
| 19. | Terpenuhinya Dukungan Pembinaan Kelompok Tani | Cakupan binaan kelompok tani | 44 % | 43,5 % | -1,14 % |

3.4. CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2023

Capaian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel. 7 di bawah ini :

**Tabel 7. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI 2022 (Rp) | Capaian (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 13,770,781,525.00 | 13,356,031,128.00 | 96.99 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12,939,323,025.00 | 12,604,753,828.00 | 97.41 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24,799,100.00 | 24,016,100.00 | 96.84 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,500,000.00 | 2,408,200.00 | 96.33 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,750,000.00 | 3,690,000.00 | 98.40 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,549,100.00 | 17,917,900.00 | 96.60 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11,705,920,305.00 | 11,474,569,576.00 | 98.02 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10,235,132,405.00 | 10,020,097,576.00 | 97.90 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1,464,437,500.00 | 1,448,364,000.00 | 98.90 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,750,000.00 | 4,546,000.00 | 95.71 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,600,400.00 | 1,562,000.00 | 97.60 |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18,258,300.00 | 16,831,500.00 | 92.19 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10,100,700.00 | 10,022,700.00 | 99.23 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 8,157,600.00 | 6,808,800.00 | 83.47 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 178,121,050.00 | 148,816,682.00 | 83.55 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 31,815,000.00 | 31,795,000.00 | 99.94 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22,679,000.00 | 22,170,000.00 | 97.76 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40,945,150.00 | 38,794,950.00 | 94.75 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 3,601,900.00 | 1,500,900.00 | 41.67 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14,554,000.00 | 14,508,000.00 | 99.68 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64,526,000.00 | 40,047,832.00 | 62.06 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100.00 |
| Pengadaan Mebel | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100.00 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 205,694,270.00 | 196,697,300.00 | 95.63 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | 203,144,270.00 | 194,147,300.00 | 95.57 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 802,330,000.00 | 739,622,670.00 | 92.18 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38,670,000.00 | 37,514,000.00 | 97.01 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 520,940,000.00 | 460,234,033.00 | 88.35 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2,720,000.00 | 2,620,000.00 | 96.32 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 240,000,000.00 | 239,254,637.00 | 99.69 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 111,773,000.00 | 95,011,314.00 | 85.00 |
| Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota | 111,773,000.00 | 95,011,314.00 | 85.00 |
| Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 70,893,000.00 | 70,555,481.00 | 99.52 |
| Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | 40,880,000.00 | 24,455,833.00 | 59.82 |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 667,449,000.00 | 606,714,986.00 | 90.90 |
| Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 14,725,000.00 | 14,269,500.00 | 96.91 |
| Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 14,725,000.00 | 14,269,500.00 | 96.91 |
| Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 259,275,000.00 | 208,224,200.00 | 80.31 |
| Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 259,275,000.00 | 208,224,200.00 | 80.31 |
| Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi | 393,449,000.00 | 384,221,286.00 | 97.65 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal | 393,449,000.00 | 384,221,286.00 | 97.65 |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 10,000,000.00 | 8,941,500.00 | 89.42 |
| Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 10,000,000.00 | 8,941,500.00 | 89.42 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan | 10,000,000.00 | 8,941,500.00 | 89.42 |
| | | | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 42,236,500.00 | 40,609,500.00 | 96.15 |
| Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 42,236,500.00 | 40,609,500.00 | 96.15 |
| Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 21,217,000.00 | 19,635,000.00 | 92.54 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 21,019,500.00 | 20,974,500.00 | 99.79 |
| | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 595,746,800.00 | 586,781,521.00 | 98.50 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 573,173,600.00 | 564,622,021.00 | 98.51 |
| Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | 15,000,000.00 | 14,600,000.00 | 97.33 |
| Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | 15,000,000.00 | 14,600,000.00 | 97.33 |
| | | | |
| Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 558,173,600.00 | 550,022,021.00 | 98.54 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 345,173,600.00 | 344,153,921.00 | 99.70 |
| Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 213,000,000.00 | 205,868,100.00 | 96.65 |
| | | | |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 22,573,200.00 | 22,159,500.00 | 98.17 |
| Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 22,573,200.00 | 22,159,500.00 | 98.17 |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 22,573,200.00 | 22,159,500.00 | 98.17 |
| | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 6,627,605,900.00 | 6,452,632,533.00 | 97.36 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1,142,488,450.00 | 1,137,163,470.00 | 99.53 |
| Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 228,493,200.00 | 227,873,200.00 | 99.73 |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik lokasi | 37,298,200.00 | 36,903,200.00 | 98.94 |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 191,195,000.00 | 190,970,000.00 | 99.88 |
| | | | |
| Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 245,124,050.00 | 243,727,800.00 | 99.43 |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman | 91,052,500.00 | 90,490,500.00 | 99.38 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 8,518,800.00 | 8,513,800.00 | 99.94 |
| Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman | 145,552,750.00 | 144,723,500.00 | 99.43 |
| | | | |
| Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 352,668,700.00 | 349,828,320.00 | 99.19 |
| Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 352,668,700.00 | 349,828,320.00 | 99.19 |
| | | | |
| Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 316,202,500.00 | 315,734,150.00 | 99.85 |
| Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 316,202,500.00 | 315,734,150.00 | 99.85 |
| | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3,174,971,350.00 | 3,116,547,284.00 | 98.16 |
| Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | 15,250,000.00 | 15,128,250.00 | 99.20 |
| Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 15,250,000.00 | 15,128,250.00 | 99.20 |
| | | | |
| Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | 3,159,721,350.00 | 3,101,419,034.00 | 98.15 |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 3,159,721,350.00 | 3,101,419,034.00 | 98.15 |
| | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1,352,673,000.00 | 1,344,696,996.00 | 99.41 |
| Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 67,289,000.00 | 67,078,000.00 | 99.69 |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 67,289,000.00 | 67,078,000.00 | 99.69 |
| | | | |
| Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 12,500,000.00 | 12,266,000.00 | 98.13 |
| Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 12,500,000.00 | 12,266,000.00 | 98.13 |
| | | | |
| Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 665,650,000.00 | 659,533,785.00 | 99.08 |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 665,650,000.00 | 659,533,785.00 | 99.08 |
| | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 47,634,000.00 | 47,130,000.00 | 98.94 |
| Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 8,425,000.00 | 8,425,000.00 | 100.00 |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 31,711,000.00 | 31,207,000.00 | 98.41 |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 7,498,000.00 | 7,498,000.00 | 100.00 |
| | | | |
| Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | 559,600,000.00 | 558,689,211.00 | 99.84 |
| Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 559,600,000.00 | 558,689,211.00 | 99.84 |
| | | | |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 957,473,100.00 | 854,224,783.00 | 89.22 |
| Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 957,473,100.00 | 854,224,783.00 | 89.22 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 401,185,000.00 | 393,591,413.00 | 98.11 |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. | 202,939,500.00 | 194,210,570.00 | 95.70 |
| | | | |
| Jumlah | 20,994,134,225.00 | 20,395,445,182.00 | 97.15 |

3.5. PERBANDINGAN CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 8. Perbandingan Capaian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

| Uraian | 2022 | 2023 | Kenaikan/Penurunan (%) |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Anggaran | 19.548.657.009 | 20.994.134.225 | 7,39 |
| Realisasi | 18.948.198.487 | 20.395.445.182 | 7,64 |
| Persentase | 96,93 | 97,15 | 0,23 |

3.6. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.

Perbandingan capaian kinerja dengan indikator kinerja utama yang menjadi IKU Walikota Metro dapat dilihat pada Tabel. 9 di bawah ini.

**Tabel. 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro**

| NO | SASARAN/ ALASAN | URAIAN IKU | | SATUAN | | REALISASI | | PROGRAM & KEGIATAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|------------|--|--------|---|-----------|---|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan | 1. | Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat | 100 | % | 100 | % | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sekretariat/Bidang/UPT yang Terlayani | Sekretariat |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | |
| | | | | | | | | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | |
| | | | | | | | | 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | | | | | - Pengadaan Mebel | | |
| | | | | | | | | 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | | | | | 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | |
| | | | | | | | | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | | | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|-----------|----------|-----------|----------|---|--|-------------------------|
| 2. | Terjaminnya Keamanannya dan Mutu Pangan | 2. | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | 21.110,55 | ton | 20.799,25 | ton | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Produksi padi x 0,6402 + stok + Pangan masuk - Pangan Keluar | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | 1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Infrastruktur Lumbung | | |
| | | | | | | | | - Pangan | | |
| | | 3. | Ketersediaan Energi Dan Protein perkapita | 2.400 | Kkal/kap | 2.664 | Kkal/kap | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan perkap (gr/hr)x%BDDxkandungan energy:100 | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | | 63 | Kkal/kap | 82,82 | Kkal/kap | 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan | Ketersediaan perkap (gr/hr)x%BDDxkandungan protein:100 | |
| | | | | | | | | - Penyediaan Informasi Harga Pangan | % BDD = % bagian yang dapat dimakan | |
| | | | | | | | | - Dan Neraca Bahan Makanan | | |
| | | | | | | | | 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | | |
| | | | | | | | | - Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | 3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi | | |
| | | | | | | | | - Penyusunan dan Penetapan target | | |
| | | | | | | | | - Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan | | |
| | | | | | | | | - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|------|-----|-------|-----|--|--|---|
| | | 4. | Peningkatan cadangan Pangan Masyarakat | 150 | ton | 175 | Ton | Program Penanganan Kerawanan Pangan 1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan di Masy. (Lumbang)(Ton) | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | 5. | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar | 88 | % | 93,7 | % | Program Pengawasan Keamanan Pangan 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi ----- x 100 % Jumlah Sampel yang Diuji | Bidang Ketahanan Pangan |
| 3. | Meningkatnya Produksi Pangan Utama | 6. | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB | 4,66 | % | - | % | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas Teknologi dan Spesifik lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian - SDG Hewan/Tanaman - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Kontribusi Sektor -----x 100 % Total PDRB | Bidang Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan |
| 4. | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Yang Modern | 7. | Produktivitas Bahan Pangan Utama | 59,2 | kw | 58,42 | Kw | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengelolaan lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian Pangan berkelanjutan/KP2B dan Lahan | Produksi (Kw) -----x 100% Luas Panen (Ha) | Bidang Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----------------------------|------|------|--------|------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Cadangan pertanian pangan Berkelanjutan/LCP2B | | |
| | | | | | | | - | 2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | | |
| | | | | | | | | - Pembagunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian | | |
| | | | | | | | | Lainnya | | |
| 5. | Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan/Penyakit Hewan Menular Dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | 8. | Cakupan Pelayanan Hewan | 8050 | ekor | 14.720 | ekor | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Hewan Tervaksin dan Terobati | Bidang |
| | | | | | | | | 1. Kegiatan penjaminan kesehatan hewan Penutupan dan pembkkaan daerah wabah Penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/kota | | Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | | | | - Pengendalian dan penanggulangan Penyakit menular zoonosis | | |
| | | | | | | | | 2. Kegiatan pengawasan pemasukan dan Pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah kabupaten kota - Penilaian resiko penyakit hewan dan Keamanan produk hewan | | |
| | | | | | | | | 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | |
| | | | | | | | | 4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan - Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|--------------------|---------|-----|-----------|-----|--|--|------------|
| | | | | | | | | - Pengujian laboratorium kesehatan - Masyarakat veteriner | | |
| | | | | | | | | 5. Kegiatan penerapan dan pengawasan Persyaratan teknis kesejahteraan hewan - Pendampingan penerpan unit - Kesejahteraan hewan | | |
| | | | | | | | | Program Pengendalian dan Pengembangan Sarana Pertanian | | |
| | | | | | | | | 1. Kegiatan pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak,dan hijauan pakan ternak Dalam daerah kabupaten /kota - Pengendalian penyediaan benih/bibit Ternak dan hijauan pakan ternak | | |
| 6. | Meningkatnya | 9 | Cakupan Binaan | 34 | % | 43,5 | % | Program Penyuluhan Pertanian | Jumlah kelompok tani, Pokdakan, Kelompok | Bidang |
| | Ketrampilan dan | | Kelompok Tani | | | | | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Ternak, KWT yang mendapat | Penyuluhan |
| | Kemampuan | | | | | | | - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | ----- x100% | |
| | Mengelola Usaha | | | | | | | Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan | Total Kelompok Tani, Pokdakan | |
| | Produktif bagi | | | | | | | Desa | Kelompok Ternak KWT | |
| | Pelaku Utamadan | | | | | | | - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan | | |
| | Pelaku Usaha | | | | | | | Petani di Kecamatan dan Desa | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana | | |
| | | | | | | | | Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | |
| | | | | | | | | - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | | |
| 7. | Meningkatnya | 10 | Produksi Perikanan | 1.984,3 | Ton | 1.907,788 | Ton | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Ikan (Ton) | Bid. |
| | Produksi | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya | ----- x 100% | Perikanan |
| | Perikanan | | | | | | | Ikan Kecil | Target Daerah (Ton) | |
| | | | | | | | | - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya | | |
| | | | | | | | | Ikan kecil | | |
| | | | | | | | | - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan | | |
| | | | | | | | | Bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | | |
| | | | | | | | | - Pemberian pendampingan, kemudahan | | |
| | | | | | | | | Akses ilmu pengetahuan, teknologi | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-----------------------|-------|---|-------|---|---|--|------------------|
| | | | | | | | | Dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan | | |
| | | | | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | |
| | | | | | | | | - Penyediaan prasarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota | | |
| | | | | | | | | - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | - Pengelolaan kesehatan ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten kabupaten Kota | | |
| | | | | | | | | - Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | | |
| | | | | | | | | - Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | |
| 8. | Meningkatnya Mutu Produk Perikanan | 11 | Tingkat Konsumsi Ikan | 40,05 | % | 37,36 | % | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ----- x 100% Target Daerah (Kg) | Bidang Perikanan |

Tabel. 10. Capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi (2023) | Capaian (%) |
|-----|---|---|---|----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024) | 5 (2025) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan | | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 93 | 91,2 | 99,67 |
| | | | Ketersediaan Energi dan Protein | Kkal perkapita | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2.664 | 111,00 |
| | | | Protein | KKal perkapita | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 82,82 | 131,46 |
| | | Sasaran1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Metro | Nilai Reformasi Birokrasi | Skor | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 0 | 0 |
| | | Sasaran 2: Terjaminnya Keamanan Dan Mutu Pangan | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar | % | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 93,7 | 106,48 |
| 2. | Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan | | Tingkat Konsumsi Ikan | Kg | 38,45 | 39,25 | 40,05 | 40,85 | 41,65 | 37,36 | 93,28 |
| | | Sasaran1 : Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | Ton | 1.907,22 | 1.945,4 | 1984,3 | 2.043,8 | 2.105,1 | 1.907,788 | 96,14 |
| | | Sasaran2 : Meningkatkan Mutu Produk Perikanan | Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Pelaku Usaha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 3. | Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian | | Kontribusi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan terhadap PDRB (Total %) | % | 4,65 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,67 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Pangan Utama | Jumlah Produksi Padi | Ton | 29.891 | 30.634 | 30.634 | 30.634 | 30.634 | 30.846,55 | 100,96 |
| | | | Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi) | Kwintal/ha | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 58,42 | 98,68 |
| | | Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern | Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 166,67 |
| | | Sasaran 3 : Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH | Cakupan Pelayanan Hewan | Ekor | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 14.720 | 182,86 |
| | | | Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0 | 0 |
| | | Sasaran 4 : Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) | % | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 43,5 | 127,94 |

Tabel. 11. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KOTA METRO TAHUN 2023

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET DAN CAPAIAN | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------|--------|---|
| | | | | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % | OPD PENANGGUNG JAWAB |
| Meningkatkan Masyarakat Produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan otonomi kreatif | Meningkatkan perekonomian daerah | Meningkatnya investasi daerah | Urusan Pangan | | | | |
| | | | 1. Ketersediaan pangan utama (beras) (ton) | 21.110,55 | 20.799,25 | 98,53 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | 2. Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita) | 2.400 | 2.664 | 111,00 | |
| | | | | 63 | 82,82 | 131,46 | |
| | | | 3. Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton) | 150 | 175 | 116,67 | |
| | | | 4. Persentase Peningkatan keamanan pangan segar (%) | 88 | 93,7 | 106,48 | |
| | | | | | | | |
| | | | Urusan Pertanian | | | | |
| | | | 1. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%) | 4,66 | | 0,00 | |
| | | | 2. Cakupan pelayanan hewan (ekor) | 8.050 | 14.720 | 182,86 | |
| | | | 3. Cakupan bina kelompok petani (%) | 34 | 43,5 | 127,94 | |
| | | | | | | | |
| | | | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | |
| | | | 1. Produksi Perikanan (ton) | 1.984,30 | 1.907,79 | 96,14 | |
| | | | 2. Tingkat Konsumsi ikan (%) | 40,45 | 37,36 | 92,36 | |

3.7. ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- $x > 90\%$: Baik (Berhasil)
- $75\% < x < 90\%$: Sedang
- $60\% \leq x < 75\%$: Cukup
- $x < 60\%$: Kurang

Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) pada Tabel 4. yaitu terdapat 19 sasaran yang direncanakan dicapai pada Tahun 2023. Sasaran-sasaran tersebut terdiri dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut.

- Kategori Baik (berhasil) : 18 indikator
 - Kategori Sedang : 0 indikator
 - Kategori Cukup : 0 indikator
 - Kategori Kurang : 4 indikator
- Total indikator : 22 indikator

Kinerja diatas menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dengan kisaran kategori baik 92,25 % - 182,86% sebanyak 18 Indikator, dan kategori kurang 4 indikator. Dengan terdapat 18 indikator kinerja diatas 90% atau kategori baik/berhasil, secara umum pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) menunjukkan bahwa Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kota Metro Tahun 2023 dikategorikan tercapai dengan kategori kinerja baik/berhasil. Untuk 4 indikator dengan kategori kinerja kurang hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran pada sub kegiatan yang mendukung Indikator kinerja peningkatan usaha pengelolaan hasil perikanan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan yang menjadikan target indikator kinerja tidak tercapai.

Untuk indikator kegiatan Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang belum tercapai Hal ini disebabkan karena dari hasil audit yang dilaksanakan Dinas Provinsi masih ada persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dan masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan kelengkapan untuk membuat/memiliki NKV yang menyebabkan belum bisa mendapatkan nomor NKV samapai akhir Tahun 2023, sehingga target belum tercapai.

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan, sehingga produk hewan pada unit usaha produk hewan yang memiliki NKV tersebut dijamin keamanan produk hewanya oleh Pejabat Otoriter Veteriner (POV) Propinsi. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha membuat NKV, diperlukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media online dan offline sehingga diharapkan ditahun mendatang banyak pelaku usaha yang membuat NKV.

Untuk indikator kegiatan Nilai Reformasi Birokrasi yang belum tercapai Hal ini disebabkan karena berdasarkan surat Kementrian Pan RB No.B/01/RB.D6/2023 tanggal 18 Januari 2023 menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pan RB No. 26 Tahun 2020 tentang pedoman dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sampai pemberitahua selanjutnya sehingga untuk nilai reformasi birokrasi tahun 2023 belum bisa diketahui.

Berdasarkan Tabel 5. Pengukuran Pencapaian RKT Tahun 2023 terlihat bahwa presentase capaian tertinggi yaitu 180 % pada indikator jumlah cakupan pelayanan hewan. Dan capaian terendah pada indikator peningkatan pelaku usaha pengelolaan hasil perikanan, Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol

Veteriner (NKV), Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 0 %. Jumlah skor diatas 90% dengan kategori baik sebanyak 18 indikator. Jumlah skor kategori untuk skor kategori kurang/terendah ada 4 indikator. Secara keseluruhan sebagian besar target kinerja tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat tercapai dengan baik/berhasil.

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada Tahun 2023 dengan Tahun 2022, berdasarkan Tabel 6, ada beberapa kegiatan yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022, Namun secara garis besar terlihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023 terealisasi dengan baik karena sebagian besar indikator kinerja dapat tercapai di atas 90 %.

Pencapaian penyerapan anggaran tahun 2023 sebagaimana pada Tabel.7. Capaian Anggaran, untuk belanja langsung atau anggaran program kegiatan sebesar 97,15%. Secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro masuk kategori sangat baik diatas penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar 96,93 Walau pada APBD Perubahan Dinas ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan mendapat tambahan anggaran, sementara waktu pelaksanaan terbatas selama 3 bulan. Namun secara keseluruhan penyerapan anggaran diatas 97,15 % atau kategori baik sekali.

Berdasarkan hasil tersebut dilakukan analisis efisiensi terhadap anggaran dan pencapaian kinerja. Terdapat efisiensi yang dihasilkan yaitu 100% (pencapaian fisik) 97,15 % (penyerapan anggaran). Sehingga terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada tahun 2023 sebesar 2,85 %.

Berdasarkan Tabel. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik untuk kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Ada 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama Dinas yang menjadi IKU Pemerintah Daerah Kota Metro. Pada Tahun 2023 sebagian besar Indikator Kinerja Utama dapat dicapai

dengan baik. Sedangkan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan Target Jangka Menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 dari 15 indikator sebanyak 11 Indikator dapat tercapai di atas 90%. Hal ini menunjukkan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dicapai dengan baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Prestasi yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2023 dilihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Prestasi yang diperoleh tahun 2023

| NO | TAHUN | NAMA | JUARA | KET |
|-----------|--------------|--|-------------------|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | 2023 | Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 | Juara favorite II | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung (TP PKK Kota Metro) |
| 2 | 2023 | Bazar UMKM Pangan Lokal Tingkat Propinsi dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 43 | Juara harapan II | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| 3 | 2023 | Lomba Video Reel Keamanan Pangan Asal Hewan Tingkat Nasional | Juara I | Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia |
| 4 | 2023 | Penghargaan atas penanganan PMK di Provinsi Lampung Tahun 2022 - 2023 | | Gubernur Lampung |
| 5 | 2023 | Penghargaan Pejabat Otoritas Veteriner Terbaik Tingkat Provinsi Lampung | Juara II | Gubernur Lampung |
| 1 | 2023 | Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 | Juara favorite II | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung (TP PKK Kota Metro) |

A. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA

1. BIDANG KETAHANAN PANGAN

a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Kurangnya kapasitas ketrampilan petugas di OKKPD terkait keamanan pangan.
- Keterbatasan peralatan yang dimiliki OKKPD untuk menunjang pelaksanaan uji cepat penggunaan rapid test kit
- Kurangnya fasilitasi anggaran untuk Tim SKPT

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

- Belum tersedianya ruangan khusus untuk laboratorium pengujian
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi PSAT seperti sertifikasi, registrasi, izin edar dan hal-hal terkait keamanan pangan segar asal tumbuhan.

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

- Hibah bantuan sarana prasarana pemanfaatan pekarangan kepada kelompok penerima manfaat kegiatan P2L diberikan pada bulan Juli 2023, dimana wilayah Indonesia mulai terdampak el-nino yang memicu terjadinya kondisi kekeringan di wilayah Indonesia secara umum.
- Pelaksanaan kegiatan fisik pada anggaran perubahan yang dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, menjadi kendala dalam penyelesaian administrasi kegiatan, karena waktu pencairan anggaran telah ditentukan batas waktunya, sehingga pengelola kegiatan harus selalu mengingatkan kepada pihak ketiga untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan persyaratan administrasi lainnya.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

- Adanya refocusing anggaran berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Adanya surat Kepala Perum Bulog kantor Cabang Lampung Tengah Perihal addendum beras CBP yang berisi tentang penyesuaian kuantum/harga yang menyebabkan berkurangnya Kuantum Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Metro
- Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang diatur dalam surat keputusan Wali Kota Metro No.41 Tahun 2021 memerlukan proses dan alur persyaratan yang cukup Panjang dan lama sehingga kendala dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Metro
- Data Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang belum diverifikasi dan difalidasi oleh Bappeda Kota Metro dan Dinas Sosial Kota Metro
- Sedikitnya jumlah subsidi bahan pangan yang disalurkan (gula Pasir, minyak goreng, telur ayam) sehingga belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Kota Metro

f. Sub Kegiatan Penyediaan informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan

- Fluktuasi harga pangan pokok sangat dipengaruhi oleh pasokan baik dari pedagang luar daerah Kota Metro, perubahan cuaca, musim tanam, dan hari besar keagamaan nasional
- Fluktuasi harga bahan pangan beras, cabe, dan bawang merah merupakan komoditi penyumbang terjadinya inflasi yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan musim tanam
- Fluktuasi harga bahan pangan daging ayam ras dan telur ayam ras merupakan komoditi penyumbang terjadinya inflasi yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga jagung pipilan kering
- Bawang putih merupakan salah satu penyumbang inflasi yang fluktuasi harganya dipengaruhi oleh impor bawang putih

g. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan

- Pengolahan data dan analisis dilakukan di akhir tahun karena pengolahan dan analisis data menunggu juknis dari Bappenas dan setelah pelaksanaan bimtek di provinsi

h. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

- Pelaksanaan hibah gabah yang semula direncanakan dilaksanakan pada triwulan II baru terlaksana pada triwulan IV yang disebabkan karena terjadinya kenaikan harga gabah yang cenderung terus naik hingga akhir tahun sehingga harga gabah yang berlaku di penggilingan tidak sesuai dengan standar harga pada anggaran yang ada.

2. BIDANG PERIKANAN

a. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Secara spesifik berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya operasional UPT Balai Benih Ikan Kota Metro adalah sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya tenaga trampil dalam pembenihan ikan yang menyebabkan seringnya kegagalan pembenihan ikan.
- Sarana produksi belum mencukupi dan belum tepat waktu.
- Luas areal dan banyaknya jenis ikan yang dibudidayakan tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada..
- Terjadinya serangan yang menyebabkan kematian benih.

3. BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tumbuhan

- Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada UPT Balai Benih dan Alsintan adalah Dana yang tidak dapat di sesuaikan dengan jadwal tanam sehingga memerlukan dana talangan,yang pada akhirnya berpengaruh pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

- Kebijakan Pemerintah Pusat dengan adanya pengadaan benih sangat berpengaruh pada penjualan benih padi produksi UPT Balai Benih dan Alsintan. Hal ini perlu di pertimbangkan untuk masa yang akan datang bagaimana mekanisme pengadaan benih yang bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penangkaran benih di UPT.
- Bantuan benih yang pengadaanya langsung dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Propinsi Lampung sangat mempengaruhi penjualan benih padi produksi UPT Balai Benih dan Alsintan.
- Pada proses produksi benih padi yang dilakukan pada UPTD Balai Benih dan Alsintan meskipun relatif berjalan dengan baik, namun serangan hama pada tanaman padi masih tetap ada. Seperti hama tikus yang sukar dikendalikan, sehingga sangat berdampak pada turunnya produksi, begitu juga dengan kondisi lahan yang kebanyakan berupa lahan rawa yang sulit saat pengolahan tanah
- Kurangnya sarana penunjang dalam proses sortir dan packing benih seperti mesin pengipas dan timbangan digital juga menjadi kendala

b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

- Pelaksanaan pengadaan elektronik yang relative baru dan ketidaksiapan pihak ketiga dalam proses tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan.
- Pengesahan APBDP yang sangat terlambat (Oktober) menyebabkan waktu yang tersedia sangat sedikit untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang bersumber dari dana APBDP.

1. BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- Populasi ternak di Kota Metro sangat sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten yang dekat dengan Kota Metro, seperti Lampung Timur dan Lampung Tengah.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

- Kegiatan pemeriksaan hewan Kurban 1443 H di Kota Metro dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kendala yang dihadapi yaitu adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku mempengaruhi lalu lintas ternak calon hewan kurban, karena sesuai dengan peraturan yang diberlakukan semasa wabah PMK yang melarang ternak dikirim dari daerah tertular ke daerah yang belum tertular, selain itu masih banyak ternak yang baru diantar ke masjid/mushola pada hari H pelaksanaan, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan antemortem apakah ternak tersebut layak disembelih.
- Masih sedikitnya partisipasi dan minat masyarakat yang melaksanakan kurban di Rumah Potong Hewan Kota Metro.
- Masih adanya panitia masjid mushola dan masyarakat pemilik hewan kurban yang tidak menerapkan protokol kesehatan di lokasi pemotongan hewan kurban, seperti masih adanya kerumunan warga yang (termasuk anak-anak) yang ingin menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Masih sulitnya menerapkan jaga jarak aman saat proses pemotongan hewan kurban dan pencacahan daging, karena luas lokasi pencacahan yang terbatas dan proses pemotongan hewan ternak besar (Sapi/kerbau) masih dilakukan oleh panitia masjid/musholla sendiri yang tidak memiliki kompetensi pemotongan ternak.
- Terbatasnya penyedia barang dengan sistem e-katalog sehingga pengadaan barang masih ada yang belum menggunakan e-katalog karena ketidakterediaan barang yang dibutuhkan dalam sistem tersebut.

2. BIDANG PENYULUHAN

a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

- Penyediaan sarana lomba tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan ada lomba lomba yang tidak terlaksana
- Pemberian hibah sarana percontohan Sistem Pertanian Terpadu Perkotaan belum dimanfaatkan secara optimal

b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- Jadwal pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan agenda Pemerintah Daerah Kota Metro yang lebih utama

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. BIDANG KETAHANAN PANGAN

a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Mengikutsertakan petugas di OKKPD di Kota Metro dalam pelatihan atau bimtek terkait peningkatan kapasitas ketrampilan aparat/petugas
- Menyampaikan surat tugas kepada Tim SKPT dengan pemberitahuan terkait biaya dari OPD masing-masing

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan

- Melakukan pembinaan dan KIE secara terus menerus baik kepada masyarakat umum, pelaku usaha dan pemangku kebijakan, baik secara tatap muka maupun menggunakan berbagai media yang ada seperti menggunakan media social, leaflet, poster, podcast dan lain sebagainya.

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

- Berkoordinasi dengan petugas penyuluh lapang di masing-masing lokasi penerima manfaat untuk memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan budidaya kelompok, sehingga ada upaya untuk mengurangi efek/dampak dari el nino. Anantara lain dengan menampung air bekas cucian sayur/beras untuk menyiram tanaman atau mendekatkan tanaman pada sumber air.
- Untuk kelanjutan program maka perlu adanya inovasi yang dilakukan ditingkat kelompok/rumah tangga dengan menggunakan sitem pengairan tetes sehingga akan lebih menghemat sumberdaya air

- Melakukan koordinasi dengan pihak ke 3, dalam menyelesaikan pekerjaan baik pekerjaan fisik maupun penyelesaian administrasi kegiatan sehingga pekerjaan yang telah selesai dapat dibayar tepat waktu

d. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

- Mengurangi beberapa kegiatan yang tidak terkait langsung dengan capaian program dan output sub kegiatan

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dengan Bulog Cabang Lampung Tengah dapat mempertimbangkan kembali untuk menunda addendum penyesuaian kuantum/harga sampai dengan penyaluran CPP di Tahun 2024
- Perlu dilakukan revisi Peraturan Wali Kota nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dengan menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional
- Data Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) agar segera dilakukan Verifikasi dan validasi
- Perlu ditingkatkan jumlah pengadaan Subsidi Pangan baik jumlah maupun jenis bahan pangan yang disubsidi terutama komoditas bahan pangan penunjang kenaikan inflasi

1. BIDANG PERIKANAN

a. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Mengusulkan pelatihan bagi tenaga trampil pengelola BBI.
- Mengusulkan penambahan sarana produksi dengan tepat waktu.
- Penambahan tenaga PNS.
- Monitoring kualitas air, kesehatan ikandan manajemen pakan.

3. BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tumbuhan

Untuk mendapatkan produksi benih yang optimal di tahun-tahun mendatang agar pemerintah dapat memberikan tambahan dana untuk:

- Membangun tempat/ruangan penyimpanan benih.
- Membeli mesin pengipas benih dan timbangan digital.
- Operasional pengolahan lahan seluas 5 ha dan dana untuk operasional pembuatan/peking benih

b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

- Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, maka survey, Investigation dan design dilaksanakan secara efektif.
- Mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik.

4. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- Peningkatan Kesehatan hewan ternak dan peningkatan jumlah kelahiran hewan ternak dengan cara kawin suntik / Inseminasi Buatan atau dengan kawin alami.

5. BIDANG PENYULUHAN

a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

- Dilaksanakan pendampingan dari penyuluh pertanian lapang yang membina di wilayah kelompok tani tersebut dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi

b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- Lebih berkoordinasi lagi dengan pihak Pemda Kota Metro agar pelaksanaan kegiatan tidak berbenturan dengan agenda Pemda Kota Metro

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pencapaian Sasaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023 rata-rata diatas 90% dikategorikan kinerja Baik/Berhasil sedangkan pencapaian Realisasi Anggaran total belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebesar Rp. 20.395.445.182 (97,15 %).

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sudah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

4.2. UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, tidak terlepas dari kendala hambatan. Untuk itu hambatan-hambatan ini selanjutnya akan dijadikan pengalaman yang berharga dalam menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan Perikanan. Adapun upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan antara lain :

1. Penentuan Prioritas program kegiatan pada program kegiatan yang bersifat langsung ke masyarakat atau padat karya.
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi secara daring.
3. Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Fisik survey, investigation dan design dapat di laksanakan secara efektif.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan secara regular sebagai *early warning system* untuk pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Perangkat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sekaligus pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dengan Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam rangka meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN